

DINAMIKA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT LOKAL: MENELISIK NILAI-NILAI LOKAL SEBAGAI KUNCI SUKSES PADA KEPEMIMPINAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Endang Hermawan^{1)*}

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia¹⁾

Email: endanghermawan918@gmail.com^{}*

Riwayat Artikel

Diterima: 15 Juli 2023

Disetujui: 18 Agustus 2023

Diterbitkan: 2 September 2023

Abstract

Effective leadership is an essential component for achieving organizational or governmental goals. Local values play a significant role in shaping leadership practices, making the ecology of public administration an important source of knowledge for the reciprocal relationship between the environment and its people. Yogyakarta, a special area in Indonesia, is a remarkable example of local government that applies local values in its leadership, preserving Indonesian culture in the process. The study aims to explore how the local government of Yogyakarta incorporates local values into its leadership. Qualitative research using a descriptive approach was conducted through literature study as the primary data collection technique. The interactive model of data analysis, including reduction, data presentation, drawing conclusions, and verification, was employed. The study found that Yogyakarta's local government integrates local values into its leadership, and the legal system also reflects these values. Cultural factors play a significant role in determining the formation of regulations or laws that apply within the area and are obeyed collectively. The research underscores the importance of local values in shaping effective leadership, promoting better governance, and preserving local cultures.

Keywords: *Local Values, Leadership, Yogyakarta*

Abstrak

Kepemimpinan yang efektif merupakan komponen penting untuk mencapai tujuan organisasi atau pemerintahan. Nilai-nilai lokal memainkan peran penting dalam membentuk praktik kepemimpinan, menjadikan ekologi administrasi publik sebagai sumber pengetahuan penting bagi hubungan timbal balik antara lingkungan dan masyarakatnya. Yogyakarta, sebuah daerah istimewa di Indonesia, adalah contoh luar biasa dari pemerintah lokal yang menerapkan nilai-nilai lokal dalam kepemimpinannya, yang pada gilirannya turut melestarikan budaya Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pemerintah lokal Yogyakarta mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam kepemimpinannya. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dilakukan melalui studi literatur sebagai teknik pengumpulan data utama. Model analisis data interaktif, termasuk reduksi, presentasi data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi, digunakan dalam penelitian ini. Penelitian menemukan bahwa pemerintah lokal Yogyakarta mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam kepemimpinannya, dan sistem hukum juga mencerminkan nilai-nilai ini. Faktor budaya memainkan peran penting dalam menentukan pembentukan peraturan atau hukum yang berlaku di daerah tersebut dan dipatuhi secara kolektif. Penelitian ini menekankan pentingnya nilai-nilai lokal dalam membentuk kepemimpinan yang efektif, mempromosikan tata kelola yang lebih baik, dan melestarikan budaya lokal.

Kata kunci: Nilai-nilai Lokal, Kepemimpinan, Yogyakarta

A. PENDAHULUAN

Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang dalam mempengaruhi anggota kelompok untuk bekerja sama mencapai tujuan organisasi (Widarto, 2013). Dalam konsep ekologi, terdapat suatu studi yang berkaitan dengan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Karena adanya keterhubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya, maka dalam konteks ekologi dalam perspektif sosiologi kebudayaan Yogyakarta, tidak terlepas dari nilai-nilai lokal dari lingkungannya, termasuk dalam kepemimpinan. Konsep kepemimpinan yang berbasis pada nilai budaya lokal merupakan aspek penting yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu organisasi. (Rosad, 2020)

Kearifan lokal merupakan sistem dalam tatanan kehidupan sosial, politik, budaya, ekonomi, serta lingkungan yang hidup di tengah-tengah masyarakat lokal. Dalam kearifan lokal tersebut tentunya ada ciri khas yang melekat dalam kearifan tradisional yaitu sifatnya yang dinamis, berkelanjutan dan dapat diterima masyarakat lingkungannya. Oleh karena itu, konsep dan nilai-nilai kepemimpinan lokal merupakan suatu hal yang harus diperhatikan dalam ekologi dalam prespektif sosiologi kebudayaan Yogyakarta, karena memiliki hubungan yang saling berkaitan.

Indonesia sendiri menerapkan sistem kepemimpinan berdasarkan nilai-nilai lokal sesuai dengan lingkungannya, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup istilah kearifan lokal merupakan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat yang fungsinya untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Dalam penerapan kebijakan tersebut salah satunya pemerintahan Yogyakarta yang masih memakai nilai-nilai lokal dalam kepemimpinannya.

Sesuai dengan peraturan UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Perda No 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta dan Perda No 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan Dan Pengembangan Kebudayaan. Hal tersebut tertulis dalam trilogi filosofi keistimewaan Yogyakarta. Sedangkan yang berkaitan dengan kepemimpinan yaitu *Manunggaling Kawula Gusti* yang dimana isi dari filosofi tersebut adalah bahwa pemimpin harus mampu memahami dan sadar kapan kita memimpin dan kapan kita dipimpin, kemudian saat memimpin harus mementingkan kepentingan yang dipimpin serta saat dipimpin mengikuti kepemimpinan sang pemimpin.

Nilai-nilai lokal tersebut tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, dan bahkan *Manunggaling Kawula Gusti* dapat menjadi contoh bagi pemerintahan daerah lainnya, karena sesuai dengan konsep ekologi dimana adanya hubungan timbal balik antara lingkungan dengan makhluk hidupnya. Jika dilihat filosofi dari *Manunggaling Kawula Gusti* pada intinya adanya sikap saling menghargai dan menghormati antara pemimpin dengan masyarakat, dengan begitu akan terciptanya ekologi administrasi publik yang sesuai dengan nilai-nilai lokal lingkungan setempat, serta terciptanya kepemimpinan pemerintahan yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat setempat.

Kepemimpinan merupakan aspek penting dalam organisasi atau pemerintahan yang memiliki peran besar dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Namun, keberhasilan sebuah kepemimpinan tidak bisa diukur semata-mata dari kemampuan seorang pemimpin dalam mempengaruhi anggota kelompok untuk bekerja sama mencapai tujuan organisasi. Dinamika kepemimpinan juga dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya lokal yang ada di lingkungan sekitar. Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kearifan lokal yang kuat adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, penelitian tentang dinamika kepemimpinan di Yogyakarta dengan fokus pada nilai-nilai lokal merupakan hal yang penting untuk dilakukan.

Dalam konteks sosiologi kebudayaan, nilai-nilai lokal memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat setempat. Nilai-nilai ini membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat dalam memandang dunia dan mengambil keputusan. Di Yogyakarta, nilai-nilai lokal yang kuat terutama berasal dari adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang. Oleh karena itu, nilai-nilai ini turut berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk dalam dunia kepemimpinan.

Telah dilakukan penelitian sebelumnya mengenai kepemimpinan berdasarkan kearifan lokal. Sebagai contoh, sebuah studi dilakukan pada implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang budaya pemerintahan "Satriya" di lingkungan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Nurhadi & Suryaningsih, 2008). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan budaya Satriya belum optimal. Inti dari implementasi kebijakan ini, yang menargetkan pegawai negeri untuk memiliki perilaku Satriya, belum sepenuhnya tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan budaya Satriya meliputi tingkat kepatuhan pelaksana kebijakan, derajat perubahan yang diinginkan, lokasi, jenis manfaat, dan pengambilan keputusan.

Studi lain dilakukan oleh Thontowi (2001) mengenai budaya lokal dan otonomi daerah dalam kaitannya dengan status istimewa Yogyakarta. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa transformasi nilai dan norma kepemimpinan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di masa depan perlu disesuaikan dengan nuansa era reformasi yang menekankan pada sistem politik dan pemerintahan yang rasional dan demokratis. Tuntutan seluruh warga untuk memiliki hak yang sama dalam proses pencalonan dan pemilihan Kepala Daerah tingkat Provinsi tidak dapat diabaikan dalam konteks reformasi. Namun, proses transformasi menuju era yang lebih demokratis tidak harus menempatkan asumsi Keistimewaan DIY sebagai atribut diskriminatif dalam hukum dan demokrasi.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan kepemimpinan dapat dipengaruhi oleh kemampuan pemimpin untuk memahami nilai-nilai lokal yang berlaku di lingkungannya. Namun, masih sedikit penelitian yang membahas tentang bagaimana nilai-nilai lokal tersebut diintegrasikan ke dalam praktik kepemimpinan di daerah tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini akan meneliti bagaimana nilai-nilai lokal di Yogyakarta diintegrasikan dalam praktik kepemimpinan di daerah tersebut.

Melalui pendekatan kualitatif dan deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana nilai-nilai lokal di Yogyakarta diintegrasikan dalam praktik kepemimpinan. Data akan dikumpulkan melalui studi literatur dan diolah menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, presentasi data, pengambilan kesimpulan, dan verifikasi. Dengan cara ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang dinamika kepemimpinan di Yogyakarta dan faktor-faktor yang berpengaruh pada keberhasilannya.

B. KAJIAN PUSTAKA

Kearifan Lokal

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup istilah kearifan lokal merupakan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat yang fungsinya untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Prabandani mengemukakan bahwa kearifan lokal merupakan nilai-nilai, norma, hukum, pengetahuan yang terbentuk melalui ajaran agama, kepercayaan, nilai-nilai tradisional, dan pengalaman yang diwariskan dari nenek moyang, dan yang akhirnya membentuk sistem pengetahuan lokal yang digunakan dalam memecahkan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat. (Laily, 2022)

Kepemimpinan Lokal

Kepemimpinan adalah proses dimana seorang pemimpin dapat mempengaruhi dan membimbing pengikutnya untuk mencapai tujuan organisasi. Pengertian ini mengandung dua konsep penting dari kepemimpinan yaitu mempengaruhi perilaku orang lain. Kepemimpinan dalam suatu organisasi bertujuan untuk mempengaruhi orang-orang yang dipimpin organisasi tersebut agar berperilaku seperti yang diharapkan atau seperti yang diarahkan oleh orang-orang yang memimpinnya (Jalal, 2013). Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi anggotanya dalam mencapai tujuan, dan mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Kearifan lokal Indonesia secara tidak langsung mengajak kita semua khususnya pemimpin untuk memiliki dan menggunakan sifat-sifat cerdas, dapat dipercaya, adil, jujur, tegas, tanggungjawab, dan sebagainya.

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus dipilih karena dapat memberi gambaran yang terperinci, mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya untuk menelaah masalah atau fenomena yang bersifat terbatas. (Creswell, 2016) Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi non partisipatoris dan dokumentasi. Ada pun informan dipilih menggunakan metode non probabilitas sampling dengan penarikan sampel purposive sampling dengan informan yang memiliki kaitan mengenai dinamika kepemimpinan di Yogyakarta dan faktor-faktor yang berpengaruh pada keberhasilannya. Kemudian data dianalisis melalui proses mempersiapkan data terlebih dahulu, memulai coding semua data, menarasikan data dan sampai pada pembuatan interpretasi data.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kearifan Lokal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam Perspektif Administrasi Publik

Peraturan Gubernur No. 72 Th. 2008 tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang sering disebut sebagai “Budaya Pemerintahan SATRIYA merupakan salah satu bentuk komitmen yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DIY dalam mengembangkan transformasi birokrasi yang berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal DIY, yang berisikan filosofi “*Hamemayu Hayuning Bawana*” dengan ajaran moral Sawiji, Greget, Sengguh ora mingkuh dan dengan semangat “*golong gilig*”. “*Hamemayu Hayuning Bawana*” secara garis besar memiliki arti bahwa sebagai manusia harus lebih mementingkan masyarakat terlebih dahulu daripada memenuhi kepuasan pribadi. Dalam kata lain harus memprioritaskan darma bakti bagi kehidupan banyak orang, dan tidak mementingkan diri sendiri (Biro Organisasi, 2014).

Deferensiasi dari filosofi tersebut jika dilihat dari konteks birokrat dapat didefinisikan menjadi tiga aspek. Pertama, “*Rahayuning Bawana Kapurba Waskithaning Manungsa*” yang artinya kelestarian dan keselamatan pada dunia ditentukan oleh kebijaksanaan dari manusianya. Kedua, “*Darmaning Satriya Mahanani Rahayuning Nagara*” yang artinya pengabdian dari para ksatria menjadikan kesejahteraan dan ketentraman bagi sebuah negara. Ketiga, “*Rahayuning Manungsa Dumadi Karana Kamanungsane*” yang artinya kesejahteraan dan ketentraman dari manusia itu terjadi karena kemanusiaannya sendiri (Nurhadi & Suryaningsih, 2008).

Budaya “Satriya” merupakan wujud manifestasi dari kearifan budaya lokal ke dalam budaya pemerintahan dengan cara diinternalisasikan ke dalam diri para birokrat. Budaya Pemerintahan SATRIYA sendiri merupakan nilai-nilai yang terkandung di dalam filosofi

"*Hamemayu Hayuning Bawana*". SATRIYA memiliki dua arti, yaitu; pertama, SATRIYA diartikan sebagai watak dari seorang ksatria. Watak ksatria adalah sikap memegang teguh ajaran moral: *sawiji, greget, sengguh, ora mingkuh* yang artinya konsentrasi, semangat, percaya diri dengan rendah hati, dan bertanggung jawab. Semangat dimaksud adalah *golong gilig* yang artinya semangat persatuan kesatuan antara manusia dengan Tuhannya dan sesama manusia. Sifat atau watak tersebutlah yang seharusnya melekat dalam jiwa seorang birokrat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Makna kedua, SATRIYA sebagai singkatan dari: Selaras, Akal budi luhur, Teladan, Rela melayani, Inovatif, Yakin dan percaya diri, Ahli atau professional (Biro Organisasi, 2014).

Dalam segi pemerintahan, munculnya UU No. 13 Th. 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sangat berpengaruh dan mempertegas kedudukan budaya Satriya itu sendiri. Dalam Undang-Undang (UU) tersebut menyatakan bahwa kebudayaan merupakan salah satu dari lima kewenangan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (BPK RI, 2012)

Faktor luar selain adanya sistem hukum, yakni faktor budaya yang juga turut andil dalam menentukan pembentukan sebuah peraturan atau hukum yang berlaku dalam suatu daerah untuk dipatuhi bersama. Hal tersebut didukung dengan adanya pernyataan dari seorang filosof Jerman Eigen Ehrlich dalam (Thontowi, 2001) bahwasanya pembentukan sebuah peraturan atau hukum itu berjalan seiring dengan berjalannya perkembangan masyarakat. Disaat suatu masyarakat di suatu daerah telah memiliki organisasi yang secara *politically legitimate*, maka peraturan hukum umumnya diakui jika dikeluarkan oleh lembaga legislatif.

Pada kenyataannya, dalam realitas sosial, hukum yang hidup di dalam masyarakat tidak selalu terpusat pada peraturan hukum tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif. Ehrlich dalam (Thontowi, 2001) menyatakan bahwa "saat ini dan maupun masa lalu, pusat daya tarik sebuah perkembangan hukum menyadarkan dirinya bahwa pembentukan tersebut tidak hanya sekedar pada teori hukum, perundang-undangan, ataupun putusan pengadilan, melainkan lebih ditentukan oleh masyarakat itu sendiri" Pandangan Ehrlich ini menjadi tepat untuk dipergunakan terutama ketika eksistensi kesultanan dalam proses kepemimpinan dan demokratisasi dikaitkan dengan makna Otonomi Daerah oleh Indonesia kepada Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Sistem Kepemimpinan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Setelah adanya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan kepada Presiden RI bahwa kedua daerah yaitu, Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman bergabung menjadi satu wilayah Negara RI, yang dinyatakan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kedua tokoh tersebut yang berperan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Hal tersebut dinyatakan dalam:

1. Piagam Kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden RI;
2. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 5 September 1945;
3. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 30 Oktober 1945. (Jogjaprov, 2022)

Makna istimewa bagi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) muncul ketika terjadi kontrak politik antara dua wilayah, yaitu Kasultanan Yogyakarta & Kadipaten Puro Pakualaman dengan Ir. Soekarno, yang berisi:

1. Istimewa dari segi Sejarah, yang menjelaskan mengenai hak asal-usul suatu daerah berdasarkan fakta sejarah dalam proses perjuangan kemerdekaan.

2. Istimewa dari segi Bentuk Pemerintahan, dimana bentuk pemerintahannya merupakan gabungan dari dua wilayah, yaitu wilayah Kasultanan & Pakualaman, menjadi satu daerah provinsi yang bersifat kerajaan dalam NKRI
3. Istimewa dari segi Kepala Pemerintahan, dimana kepala daerah dijabat oleh Sultan dan Adipati. (Suminar, 2016)

Sejalan dengan perkembangan pemerintahan Yogyakarta, terdapat proses yang terus berubah atau berkembang, bermula menggunakan tipe pemerintahan feodal dan tradisional menjadi suatu pemerintahan dengan struktur modern (Jogjapro, 2022). Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan bentuk perubahan dari Pemerintahan Negara Kesultanan Yogyakarta dan Pemerintahan Negara Kadipaten Pakualaman, khususnya bagian Parentah Jawi yang mulanya dipimpin oleh Papatih Dalem untuk Negara Kesultanan Yogyakarta, dan Papatih Pakualaman untuk Negara Kadipaten Pakualaman. Oleh karena itu Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki hubungan yang kuat dengan Keraton Yogyakarta maupun Puro Paku Alaman. Hal tersebut jugalah yang membuat banyak pegawai negeri sipil daerah yang menjadi Abdi dalem Kerajaan Keraton maupun Puro. Meskipun demikian, mekanisme perekrutan calon pegawai negeri sipil daerah tetap dilakukan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang No. 22 Th. 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Didaerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri yang menjadi landasan Undang-Undang No. 3 Th. 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), baik Kepala maupun Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diangkat oleh Presiden dari keturunan keluarga yang berkuasa di daerah tersebut, pada zaman sebelum Republik Indonesia, dan yang masih menguasai daerahnya; dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Kecakapan
2. Kejujuran
3. Kesetiaan
4. Mengingat adat istiadat di daerah itu.

Dengan demikian, Kepala Daerah Istimewa, sampai tahun 1988, dijabat secara otomatis dan mutlak oleh Sultan Yogyakarta yang bertahta, dan Wakil Kepala Daerah Istimewa, sampai tahun 1998, dijabat secara otomatis dan mutlak oleh Pangeran Paku Alam yang bertahta. Nomenklatur Gubernur, dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa baru digunakan mulai tahun 1999 dengan lahirnya Undang-Undang No. 22 Th. 1999 tentang Pemerintah Daerah. Saat ini mekanisme pengisian jabatan Gubernur, dan Wakil Gubernur DIY diatur dengan UU No. 13 Th. 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keistimewaan yang terdapat pada UU No. 13 Th. 2012 ini didasarkan pada sejarah dan hak asal-usul Yogyakarta. Kewenangan Istimewa diantaranya:

1. Tata cara pengisian Gubernur dan Wakil Gubernur dari segi jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang.
2. Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
3. Kebudayaan.
4. Pertanahan.
5. Tata Ruang. (Annafie & Nurmandi, 2016)

E. SIMPULAN

Berdasarkan perspektif sosiologi budaya, adat istiadat atau kebudayaan yang menjadi keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat Yogyakarta. Hal ini terlihat dari kepatuhan masyarakat DIY terhadap adat istiadat tersebut, yang secara tidak langsung mencerminkan kekayaan budaya yang dimiliki oleh daerah tersebut. Selain itu, pengakuan dan penghormatan terhadap nilai-

nilai lokal yang terkandung dalam adat istiadat tersebut juga dapat memperkuat rasa identitas dan kebanggaan masyarakat Yogyakarta terhadap daerahnya sendiri. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan adalah perlunya penelitian lebih lanjut yang mendalam terkait peran dan fungsi adat istiadat dalam kehidupan sosial masyarakat DIY, serta upaya untuk mempromosikan dan melestarikan kebudayaan lokal yang menjadi keistimewaan daerah tersebut.

REFERENSI

- Akbar, H. F., Turmuji, H. F., Lestari, M. D., Jabbar, M. A., & Abdal. (2021). Jurnal Inovasi Penelitian. *Jurnal Inovasi Pemerintahan*, 1(12).
- Anggara, S. (2018). *Ekologi Administrasi: Holistik, Kontemporer, dan Kontekstual* (Cetakan 1, Vol. 53, Issue 9). Pustaka Setia.
- Annafie, K., & Nurmandi, A. (2016). *Kelembagaan Otonomi Khusus (Otsus) dalam Mempertahankan Nilai-Nilai Kebudayaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. 3(2), 304–338.
- Biro Organisasi. (2014). *Budaya Pemerintahan (SATRIYA)*. <https://biroorganisasi.jogjaprovo.go.id/v1/budaya-pemerintahan-satriya/>
- BPK RI. (2012). *Undang-Undang (UU) No. 13 Tahun 2012 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta*. JDIH BPK RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39064>
- Engkus. (2017). Administrasi Publik Dalam Perspektif Ekologi. *Jispo*, 7(1), 91. <https://doi.org/10.15575/jp.v7i1.1739>
- Hariyanti, M. (2015). *Analisis Data Kualitatif Miles dan Huberman*. <https://www.kompasiana.com/meykurniawan/556c450057937332048b456c/analisis-data-kualitatif-miles-dan-huberman>
- Hayati, R. (2021). *Pengertian Penelitian Deskriptif, Macam, Ciri, dan Cara Menulisnya*. <https://penelitianilmiah.com/penelitian-deskriptif/>
- Jalal. (2013). *Kepemimpinan berbasis Kearifan Lokal*. https://www.academia.edu/6394938/KEPEMIMPINAN_BERBASIS_KEARIFAN_LOKAL
- Jogjaprovo. (2022). *Sejarah*. Jogjaprovo.Go.Id. <https://jogjaprovo.go.id/p/3-sejarah>
- Laily, I. N. (2022). *Kearifan Lokal adalah Nilai Luhur, Pahami Ciri-Ciri dan Fungsinya*. <https://katadata.co.id/iftitah/berita/6200d042cf539/kearifan-lokal-adalah-nilai-luhur-pahami-ciri-ciri-dan-fungsinya>
- Nurhadi, I. M., & Suryaningsih, M. (2008). *Implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Pemerintahan “Satriya” di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Rosad, A. (2020). *Konsep Dan Nilai-Nilai Kepemimpinan Etnik Serta Kearifan Lokal Sumatera Selatan dan Etnik Lainnya di Indonesia*. <https://aderosad.blogspot.com/2020/03/konsep-dan-nilai-nilai-kepemimpinan.html>
- Suminar, A. (2016). *Alasan Jogja Diizinkan Bersistem Kerajaan di Indonesia*. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2016/08/04/alasan-jogja-diizinkan-bersistem-kerajaan-di-indonesia>
- Sutiyatno, S. (2017). *Metodologi Penelitian (Penelitian Teknologi Informasi, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Penelitian Eksperimen, Penelitian Research & Development dan Penelitian Tindakan)*. Penerbit K-Media.
- Thontowi, J. (2001). *Budaya Lokal dan Otonomi Daerah dalam Kaitannya dengan Keistimewaan Yogyakarta*. *Millah*, 1(1).

-
- Widarto. (2013). *Kepemimpinan (Leadership)*.
<http://staffnew.uny.ac.id/upload/131808327/pengabdian/10kepemimpinan-leadership.pdf?msclkid=1d92fb37cee511ec9f7e48b5e0c3acff>
- Yuda, A. (2021). *Pengertian Kegiatan Administrasi Menurut Para Ahli, Ciri, Jenis, Unsur, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya*. <https://www.bola.com/ragam/read/4520011/pengertian-kegiatan-administrasi-menurut-para-ahli-ciri-jenis-unsur-fungsi-tujuan-dan-contohnya>